



Partisipasi Buruh dalam Pemilu: Tinjauan Awal

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sunardi Universitas Islam Negeri Datokarama sunardi@uindatokarama.ac.id	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 3, Desember 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Sunardi. (2025). Partisipasi Buruh dalam Pemilu: Tinjauan Awal. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (3), 6007-6012.

Abstrak

Keikutsertaan Partai Buruh sebagai peserta Pemilu 2024 menandai babak baru dalam politik buruh Indonesia, yaitu pergeseran dari politik jalanan menuju politik elektoral. Momentum ini membuka peluang baru bagi representasi politik buruh, tetapi sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas Partai Buruh dalam membangun partisipasi dan keterwakilan politik buruh. Artikel ini bertujuan mengkaji mekanisme partisipasi dan keterwakilan politik buruh dalam Pemilu 2024 melalui kehadiran Partai Buruh. Penelitian ini merupakan studi literatur (*library research*) yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelaahan sistematis artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, di Indonesia. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan membandingkan berbagai perspektif yang berkembang dalam literatur. Artikel ini menjadi tianjaun awal dalam melihat partisipasi buruh pada pemilu di Indonesia.

Kata kunci: politik buruh, partisipasi politik, keterwakilan politik, studi literatur.

Abstract

Human resource development (HRD) is a crucial factor in improving the quality of local government bureaucracy, especially in institutions responsible for community empowerment and village development. This study aims to describe the condition of HRD at the Department of Community and Village Empowerment (DPMD) of Sigi Regency and analyze the influencing factors using Armstrong's Human Resource Development theory. The research employs a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and documentation involving the Head of Department, Secretary, structural officials, financial staff, and administrative personnel. The findings indicate that HRD at the DPMD of Sigi Regency has not been optimally implemented and is not based on a systematic analysis of competency needs. Training programs remain incidental, a continuous learning culture has not yet been established, employee empowerment is limited, and training evaluations are not conducted comprehensively. The main obstacles include limited budget allocation, the absence of strategic HRD planning, and inadequate supporting facilities. In conclusion, HRD implementation at the DPMD of Sigi Regency has not aligned with Armstrong's concept, which emphasizes strategic planning, competency-based development, and organizational support. Therefore, competency mapping, improved training quality, and strengthened organizational commitment are required to achieve effective and sustainable HRD.

Key Words: Target Accuracy, Program Socialization, Program Objectives, And Program Evaluation .

A. Pendahuluan

Untuk pertama kali setelah reformasi, partai buruh terdaftar secara resmi sebagai peserta pemilu yang akan berkontestasi di 2024. Kehadiran partai buruh menjadi momentum bagi transisi politik buruh yang mulai merambah dari politik jalanan ke politik elektoral. Ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi politik buruh. Namun, dibalik optimisme yang ada sejumlah pertanyaan kunci masih terus menyertai perjalanan politik buruh. Apakah kehadiran partai buruh sebagai salah satu peserta pemilu 2024 mendatang akan efektif untuk mewakili kepentingan politik buruh, bagaimana mekanisme keterwakilan yang diusung partai buruh untuk mendapatkan dukungan politik dari suara buruh, apakah mereka menaruh keterwakilan berdasarkan basis tempat kerja (pabrik), lokasi tempat tinggal, atau atas dasar serikat dan bagaimana peran partai buruh dalam mendorong partisipasi buruh dalam pemilu 2024. Deretan pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang terus hadir seiring dengan keberadaan partai buruh dalam menghadapi pemilu 2024.

Di Indonesia, tema riset mengenai pemilu partisipasi dan keterwakilan politik buruh belum banyak dilakukan pasca reformasi. Kecuali beberapa sarjana yang nyaris menginggung persoalan tersebut seperti Michale Ford dan Caraway, tetapi riset yang dilakukan oleh Ford dan Caraway belum menempatkan konteks partai buruh pada kontestasi di pemilu. Riset Ford dan Caraway masih melihat dinamika politik buruh sebelum hadirnya partai buruh sebagai peserta pemilu. Pada riset lain yang dilakukan oleh Ford, melihat bagaimana model pengorganisasian yang dilakukan oleh buruh. Riset ini memotret politik sehari-hari buruh diberbagai sektor. Namun sangat di sayangkan, sebab model pengorganisasian yang dilihat oleh Ford belum sampai pada bagaimana model pengorganisasian tersebut bisa bertahan ketika berhadapan dengan proses pemilu. Kesimpulan yang dibangun oleh Ford, bahwa model pengorganisasian yang dilakukan oleh buruh di luar serikat buruh telah efektif untuk menghimpun buruh tetapi belum bisa berbicara banyak terutama dalam menyuarakan tuntutan dan kepentingan buruh di gelanggang elektoral (Ford, 2019; Ford & Honan, 2019). Begitupun oleh Frey dengan pendekatan yang sangat antropologis, menempatkan geliat politik sehari-hari buruh untuk melawan dan meminta perlindungan di tengah keterbatasan jaminan keamanan yang disediakan oleh negara (Frey, 2020). Studi ini dengan sangat baik memperlihatkan tentang ekspresi politik sehari-hari buruh. Tetapi, seperti dengan studi Ford, studi ini tidak bisa banyak membantu dalam menjelaskan partisipasi buruh dalam arena formal, seperti pemilu. Selain itu, studi ini masih menempatkan partisipasi politik dalam dimensi informal.

Singkatnya, riset dengan tema semacam ini bahkan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang masih baru. Terlebih setelah hadirnya partai buruh sebagai salah satu peserta pemilu di 2024 mendatang. Dalam konteks politik buruh, keberadaan partai buruh di sinyalir akan memberikan nuansa yang berbeda dari proses pemilu sebelumnya. Khususnya bagi buruh, kelas sosial dalam masyarakat yang sejauh ini memiliki jumlah yang tidak sedikit. Data terbaru yang telah di rilis oleh Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Februari 2023 memperlihatkan jika jumlah buruh yang terdaftar di Indonesia telah mencapai 146,62 juta orang. Angka ini belum termasuk dengan angka buruh yang bekerja di sektor informal yang dalam pencatatannya belum teradministrasi dengan baik.

Lebih ironisnya, dari jumlah buruh yang ada, kurang dari 50% dari seluruh buruh di Indonesia yang tergabung dalam serikat (Sunardi, 2017). Sementara ketika berbicara mengenai partisipasi dan keterwakilan politik, serikat buruh menjadi satu-satunya wadah yang secara formal di sediakan oleh negara. Ketika buruh sendiri tidak tergabung dalam serikat buruh ini semakin menarik pertanyaan penting tentang bagaimana partisipasi dan keterwakilan buruh. Jika dalam prakteknya, lembaga keterwakilan yang seharusnya menjadi satu-satunya payung mereka tidak tersedia. Atau tersedia tetapi tidak mampu menghimpun buruh. Sementara partai politik adalah kristalisasi dari berbagai serikat buruh yang ada. Partai buruh sebagai rumah bersama dari berbagai macam, corak dari serikat buruh yang ada. Kondisi ini menarik untuk dilihat lebih jauh, sekaligus untuk memahami bagaimana mekanisme keterwakilan dan partisipasi politik buruh pada pemilu 2024 di tengah situasi basis dari politik buruh yang sangat rapuh.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji partisipasi politik buruh dalam arena elektoral di Indonesia. Studi ini merupakan tinjauan awal yang bertujuan memetakan perkembangan gagasan, perdebatan, dan

temuan penelitian mengenai transformasi politik buruh dari politik jalanan menuju politik formal, khususnya dalam konteks kehadiran Partai Buruh pada Pemilu 2024. Sumber data penelitian berupa literatur sekunder yang meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian, serta dokumen organisasi buruh yang membahas partisipasi politik, keterwakilan politik, gerakan buruh, serikat pekerja, dan Partai Buruh di Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya terhadap tema penelitian, dengan fokus pada publikasi sejak era Reformasi hingga tahun 2019. Rentang waktu tersebut dipilih karena merepresentasikan fase penting perkembangan gerakan buruh, penguatan serikat pekerja, serta dinamika politik yang menjadi landasan munculnya kembali Partai Buruh sebagai aktor dalam politik elektoral.

Data dianalisis menggunakan teknik *analisis isi (content analysis)* melalui proses identifikasi, klasifikasi, perbandingan, dan sintesis terhadap berbagai perspektif dalam literatur. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi pola partisipasi politik buruh, mekanisme keterwakilan yang berkembang, serta peluang dan tantangan politik buruh dalam memasuki arena elektoral. Sebagai studi literatur, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi empiris, melainkan menyusun sintesis konseptual sebagai pijakan awal untuk memahami dinamika partisipasi politik buruh dalam konteks Pemilu 2024.

C. Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Teoritis

Studi ini mendesak dengan melihat pada tiga aspek. Pertama secara kontekstual, kehadiran partai buruh sebagai peserta pemilu di tahun 2024 sebagai sesuatu yang baru sepanjang sejarah pemilu serentak pasca reformasi di Indonesia. Kehadiran partai buruh bisa dimaknai sebagai momentum bagi politik buruh yang telah mengalami transformasi dari politik jalanan ke politik elektoral. Meskipun sebelumnya praktek semacam ini (politik elektoral) telah dilakukan dengan menitipkan kader buruh ke partai politik untuk ikut pada proses electoral, namun yang menarik dalam konteks kebaruan ini bahwa saat ini partai buruh hadir sendiri sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam hal keterwakilan dan keterlibatan buruh akan memberikan nuansa yang berbeda dari model politik elektoral sebelum partai buruh hadir.

Kedua dari segi perspektif. Sejumlah studi telah banyak mendokumentasikan perjalanan politik buruh di Indonesia pasca reformasi (T. Caraway & Ford, 2014; T. L. Caraway et al., 2015, 2019; T. L. Caraway & Ford, 2017, 2020; Ford, 2014; Ford & Sirait, 2016; Hadiz, 1997; Heryanto & Hadiz, 2005; Islam, 2001; N Warouw, n.d.; Panimbang & Mufakhir, 2018; Tjandraningsih, 2012; Törnquist, 2004). Namun sejumlah studi yang ada masih didominasi oleh perspektif institusional dan struktural. Perspektif institusional melihat bahwa partisipasi buruh dalam elektoral di jembati oleh serikat buruh. Kebanyakan proses politik buruh di wakikan oleh serikat buruh. Hubungan yang berlangsung biasanya antara serikat buruh dengan partai politik tertentu. Begitupun perspektif struktural yang sejak awal telah meminggirkan buruh dan serikat buruh dalam proses pemilu. Terutama karena melihat bahwa kecenderungan politik buruh selalu tidak berdaya akibat dominasi struktural seperti komposisi modal yang selalu mendikte keberadaan buruh (Hadiz, 1997; Panimbang & Mufakhir, 2018; Robison & Hadiz, 2004). Akibatnya, dalam relasi seperti ini, aktivisme buruh (secara personal) minim mendapat penjelasan mengenai bagaimana keterlibatan buruh dalam proses pemilu (Aspinall, n.d.; Ford, 2006). Padahal untuk konteks di Indonesia, lebih banyak buruh yang belum tergabung dalam serikat. Sehingga dalam praktek politik keseharian buruh, lebih banyak dilakukan secara persorangan alih-alih menitipkan kepentingan mereka dalam serikat buruh. Dalam situasi seperti ini, maka artikel ini akan memotret politik buruh dengan menggunakan perspektif agensi. Perspektif ini dianggap lebih memadai dalam menjelaskan keterlibatan buruh dalam politik.

Ketiga, studi yang melihat secara langsung hubungan buruh (secara personal) dengan negara belum terlalu banyak tersedia. Kecuali studi yang dilakukan oleh Juliawan yang melihat relasi politik buruh (tanpa perantara serikat) dengan kapital (Habibi, 2013; Juliawan, 2010, 2011). Tetapi studi yang dilakukan oleh Juliawan lebih banyak menyoroti pada aspek politik informal buruh. Seperti bagaimana buruh memanfaatkan kekuatan-kekuatan informal. Studi lain yang terkemuka misalnya dilakukan oleh Caraway dan Ford, dalam studi ini caraway dan ford berupaya untuk melihat kontestasi buruh dalam electoral (T. L. Caraway & Ford, 2020). Sayangnya dalam studi ini, belum menempatkan Makassar sebagai salah satu pengamatannya. Padahal, untuk konteks di Indonesia Timur, Makassar sebagai salah satu basis industri terbesar di Indonesia.

Pemilu dan Politik Buruh di Indonesia

Sepanjang sejarah pemilu di Indonesia, keterlibatan buruh dalam pemilu tidak pernah habis dibicarakan. Polemik ini terus berkembang seiring dengan konteks sosial yang terus membentuk perjalanan politik buruh dalam proses pemilu. Paling terbaru, kini debat yang berada dipusaran politik buruh terkait dengan problematisasi partai buruh. Kehadiran partai buruh sebagai peserta pemilu menjelang pemilu 2024 membagi sarjana menjadi dua poros yang saling bersilang pendapat. Satu poros memandang bahwa keberadaan partai buruh sebagai peserta pemilu adalah langkah yang terburu-buru dan gegabah. Poros ini melihat bahwa sikap ini terlalu ambisius. Pihak ini menuding, partai buruh dibangun dengan mengabaikan instrumen politik yang lain, seperti keberadaan serikat buruh dan organisasi kelas pekerjaan lainnya. Pendekatan partai buruh yang sangat elitis juga menjadi nada sinisme yang terus dilontarkan oleh para pengkritik partai buruh. Sebaliknya, pihak lain melihat dengan cara yang berbeda. Bagi pihak ini, keterlibatan buruh melalui partai buruh untuk pemilu 2024 menjadi eksperimen politik yang sangat menjanjikan. Lewat eksperimen ini, buruh tidak lagi berkuat hanya pada perjuangan melalui eks-parlementer tetapi dengan hadirnya partai buruh menambah alternatif perjuangan buruh. Selain itu, pihak ini juga memandang bahwa hadirnya partai buruh menepis tuduhan bahwa buruh dan serikat buruh tidak memiliki agenda politik yang lebih luas. Lewat partai buruh yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 mematahkan tuduhan tersebut. Yang paling penting, kemandirian buruh yang mulai terlepas dari bayang-bayang dominasi kekuatan “struktural”. Dengan hadirnya partai buruh sebagai kendaraan politik buruh menjadi inidikasi yang sangat jelas bahwa politik buruh telah berubah menjadi politik yang lebih independen. Terlepas, apakah nantinya pada prakteknya akan seindah konsepsi ideal tersebut, itu persoalan yang lain. Yang pasti untuk saat ini, diatas kertas partai buruh telah tercatat sebagai peserta pemilu 2024 dan capaian untuk sampai di titik ini menepis berbagai tuduhan miring tentang partai buruh.

Terlepas dari polemik yang berlangsung, kami telah mengidentifikasikn berbagai ekspreisemen partisipasi politik buruh dalam pemilu yang telah banyak didokumentasikan di Indonesia.. Eksperimen ini berlangsung dalam durasi pasca reformasi. Secara garis besar ada dua pola bentuk partisipasi politik buruh di Indonesia. Pertama, bentuk partisipasi politik buruh melalui eks-parlementer. Wujud dari partisipasi politik buruh melalui eks-parlementer dilakukan dengan aksi jalanan, mogok di pabrik dan blockade jalan. Aksi jalanan, mogok di pabrik dan blockade jalan sebagai ekspresi politik buruh yang di tempuh untuk menolak berbagai kebijakan negara yang dianggap tidak memihak pada buruh (Panimbang & Mufakhir, 2018). Di awal-awal reformasi, politik eks parlementer di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ini menandakan bahwa, Gerakan politik eks parlementer terutama di awal-awal kemerdekaan menjadi satu-satunya saluran politik yang dimiliki oleh buruh.

Bentuk kedua partisipasi politik buruh di Indonesia pasca reformasi adalah partisipasi politik parlementer. Untuk eksperimen partisipasi politik parlementer di Indonesia mulai dilakukan di tahun 2004. Tahun-tahun tersebut secara bersamaan untuk pertama kali di Indonesia berlangsung pemilihan umum secara langsung mulai dari presiden dan wakil presiden hingga di legislative di daerah. Pemilihahn secara langsung yang terjadi di daerah memberika ruang politik bagi aktifisme buruh untuk terlibat dalam proses pemilu tersebut. Dalam catatan sejarah, eksperimen partisipasi politik melalui parlementer di tempuh oleh buruh melalui dua pola. Pola pertama adalah serikat buruh akan mengusung figur buruh tertentu untuk menjadi calon legislatif diberbagia tingkatan. Pola ini dilakukan dengan menitipkan figur buruh ke salah satu partai peserta pemilu. Untuk beberapa kasus, pola ini ada yang cukup efektif. Misalnya yang berlangsung di Karawang, seorang aktifis buruh yang maju sebagai calon legislatif RI melalui partai Gerindra yang kemudian berhasil meraih satu kursi di DPR-RI. Meskipun untuk beberapa contoh yang gagal juga tidak kalah banyak. Namun yang penting bahwa pola dari partisipasi politik buruh fase itu adalah buruh melalui serikat buruh membangun kerjasama dengan partai tertentu.

Kemudian untuk pola kedua dilakukan dengan menjadikan figur buruh dan serikat buruh sebagai bagian dari tim pemenangan salah satu kandidat. Dalam konteks pemilu, partisipasi politik buruh dengan pola ini dilakukan secara tidak langsung. Buruh dan serikat buruh tidak menjadi bagian utama yang berkontestasi dalam pemilu. Tetapi keterlibatan dan partisipasi buruh hanya sebagai tim pemenangan. Meskipun hanya sebagai tim pemenangan, tetapi untuk beberapa kasus keterlibatan dan partisipasi buruh dan serikat buruh pada fase ini cukup efektif. Beberapa contoh yang berhasil dengan pola ini misalnya, bagaimana serikat buruh di Makassar menjadi salah satu tim pemenangan bakal calon walikota di Makassar. Keterlibatan mereka,

meskipun tidak terlalu terlihat namun terbukti efektif untuk mendulang suara buruh, khususnya buruh di Kawasan KIMA yang tergabung dalam serikat pekerja nusantara.

Berbagai ilustrasi dari partisipasi dan keterlibatan politik buruh ini dilakukan sebelum partai buruh resmi bergabung sebagai peserta pemilu 2024. Dalam konteks 2024, partai buruh yang membawa slogan sebagai partai untuk kelas pekerja hadir sebagai kendaraan politik untuk buruh. Jelas bahwa dengan kehadiran partai buruh akan memberikan warna berbeda bagi keterlibatan politik buruh di tahun 2024 mendatang. Beberapa aspek misalnya, seperti akan mengkonfirmasi apakah kehadiran partai buruh sebagai peserta pemilu 2024 akan memberikan dimensi berbeda bagi partisipasi politik buruh atau justru sebaliknya. Serta bagaimana pergeseran dari pola-pola partisipasi politik buruh setelah adanya partai buruh sebagai peserta pemilu 2024.

D. Kesimpulan

Kehadiran Partai Buruh sebagai peserta Pemilu 2024 menandai babak baru dalam politik buruh Indonesia melalui pergeseran orientasi dari politik jalanan menuju politik elektoral. Meskipun demikian, studi literatur ini menunjukkan bahwa keberadaan Partai Buruh belum serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar mengenai partisipasi dan keterwakilan politik buruh. Lemahnya basis organisasi buruh, rendahnya tingkat keanggotaan serikat pekerja, serta belum jelasnya mekanisme representasi antara Partai Buruh dan konstituen buruh menjadi tantangan utama dalam mewujudkan representasi politik yang substantif. Pada akhirnya, keberhasilan Partai Buruh tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya memperoleh suara dalam kontestasi elektoral, tetapi juga oleh kemampuannya membangun hubungan representatif yang berkelanjutan dengan komunitas buruh melalui penguatan organisasi, konsolidasi basis sosial, dan perluasan partisipasi politik di luar momentum pemilu. Artikel ini menegaskan bahwa transisi politik buruh ke arena elektoral merupakan proses yang masih berlangsung dan memerlukan penguatan kelembagaan serta kajian empiris lanjutan untuk menilai efektivitas Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan politik buruh di Indonesia.

E. Referensi

- Aspinall, E. (n.d.). *Democratisation, the working class and the Indonesian transition*. Retrieved November 29, 2023, from <https://search.informit.org/doi/abs/10.3316/ielapa.200104943>
- Caraway, T., & Ford, M. (2014, May). *Labour unions divided by Indonesia's presidential elections*. East Asia Forum.
- Caraway, T. L., & Ford, M. (2017). Institutions and collective action in divided labour movements: Evidence from Indonesia. *Journal of Industrial Relations*, 59(4), 444–464. <https://doi.org/10.1177/0022185617710046>
- Caraway, T. L., & Ford, M. (2020). Labor and Politics in Indonesia. In *Labor and Politics in Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108777858>
- Caraway, T. L., Ford, M., & Nguyen, O. K. (2019). Politicizing the minimum wage: Wage councils, worker mobilization, and local elections in Indonesia. *Politics and Society*, 47(2), 251–276. <https://doi.org/10.1177/0032329219838917>
- Caraway, T. L., Ford, M., & Nugroho, H. (2015). Translating membership into power at the ballot box? Trade union candidates and worker voting patterns in indonesia's national elections. *Democratization*, 22(7), 1296–1316. <https://doi.org/10.1080/13510347.2014.930130>
- Ford, M. (2006). Labour NGOs: An alternative form of labour organizing in Indonesia, 1991–1998. *Asia Pacific Business Review*, 12(2), 175–191. <https://doi.org/10.1080/13602380500532263>
- Ford, M. (2014). Learning by doing: Trade unions and electoral politics in Batam, Indonesia, 2004–2009. *South East Asia Research*, 22(3), 341–357. <https://doi.org/10.5367/sear.2014.0219>
- Ford, M. (2019, March). *Organised labour and the 2019 elections: a rerun of 2014? - Indonesia at Melbourne*.
- Ford, M., & Honan, V. (2019). The limits of mutual aid: Emerging forms of collectivity among app-based transport workers in Indonesia. <https://doi.org/10.1177/0022185619839428>, 61(4), 528–548. <https://doi.org/10.1177/0022185619839428>
- Ford, M., & Sirait, G. M. (2016). The state, democratic transition and employment relations in Indonesia. *Journal of Industrial Relations*, 58(2), 229–242.

- <https://doi.org/10.1177/0022185615617956>
- Frey, B. (2020). Platform Labor and In/Formality: Organization among Motorcycle Taxi Drivers in Bandung, Indonesia. *Anthropology of Work Review*, 41(1), 36–49. <https://doi.org/10.1111/AWR.12187>
- Hadiz, V. (1997). *Workers and the State in New Order Indonesia*. Routledge.
- Heryanto, A., & Hadiz, V. R. (2005). Post-authoritarian Indonesia: A comparative Southeast Asian perspective. *Critical Asian Studies*, 37(2), 251–275. <https://doi.org/10.1080/14672710500106341>
- Islam, I. (2001). Beyond Labour Market Flexibility: Issues and Options for Post-Crisis Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 6(3), 305–334. <https://doi.org/10.1080/13547860120097377>
- Juliawan, B. H. (2010). Extracting labor from its owner: Private employment agencies and labor market flexibility in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 42(1), 25–52. <https://doi.org/10.1080/14672710903537464>
- Juliawan, B. H. (2011). Street-level politics: Labour protests in post-authoritarian Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 41(3), 349–370. <https://doi.org/10.1080/00472336.2011.582706>
- N Warouw. (n.d.). Working Class Revisited: Class Relations in Indonesian Provincial Towns. *Library.Oapen.Org* N Warouw *In Search of Middle Indonesia*, 2014•*library.Oapen.Org*. Retrieved November 29, 2023, from <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/32290/613320.pdf?sequence=1#page=65>
- Panimbang, F., & Mufakhir, A. (2018). Labour Strikes in Post-Authoritarian Indonesia, 1998–2013. In J. Nowak, M. Dutta, & P. Birke (Eds.), *Workers' Movements and Strikes in the Twenty-First Century: A Global Perspective* (pp. 21–43). Rowman & Littlefield International.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. In *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon. <https://doi.org/10.4324/9780203401453>
- Sunardi. (2017). *Ekonomi Politik Kebijakan Perburuhan: Status Kerja dan Dampaknya Terhadap Serikat Buruh di Makassar*. Universitas Gadjah Mada.
- Tjandraningsih, I. (2012). *State-Sponsored Precarious Work in Indonesia*. <https://doi.org/10.1177/0002764212466236>
- Törnquist, O. (2004). Labour and democracy? Reflections on the Indonesian impasse. *Journal of Contemporary Asia*, 34(3), 377–399. <https://doi.org/10.1080/00472330480000171>